

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

**Bab I Berisi :**

1. Latar Belakang
2. Tujuan Penyusunan LKj
3. Gambaran Umum Kab. Manggarai
4. Isu Strategis Kab. Manggarai
5. Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Manggarai
6. Jumlah Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kab. Manggarai
7. SDM Pemerintah Kab. Manggarai
8. Inovasi Pengelolaan SDM Aparatur

Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan berbagai **urusan pemerintahan**. Urusan dimaksud merupakan kewenangan presiden yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kementerian /Lembaga dan atau Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud harus dilaporkan kepada para pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian sesungguhnya pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur yang menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, efisien dan efektif. Dalam konteks ini maka pelaporan merupakan sebuah bentuk akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKj berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai juknis tersebut maka, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKj disusun pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuannya adalah mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun berkenan. Hasil perbandingan itu dianalisis dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun berkenan dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir serta realisasi tahun berkenan dengan target akhir masa RPJMD. Juga membandingkan realisasi indikator yang sama atau sejenis dari tahun berkenan dengan beberapa Kabupaten terdekat dan Propinsi serta dengan realisasi nasional untuk indikator yang sama atau hampir sama jika ada.

Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 53 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa dokumen LKj Pemerintah Kabupaten harus disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara PANRB dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN LKj**

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai selama tahun 2016 dan atau sampai dengan tahun 2016.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **1.3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

### **1. Letak Geografis dan Luas**

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabupaten Manggarai berada di Ujung Barat Pulau Flores yang secara geografis terletak diantara 8<sup>o</sup>.14'LS - 09<sup>o</sup>.00 LS dan 120<sup>o</sup>,20' BT - 120<sup>o</sup>,55<sup>o</sup> BT, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :



- 2) Berdasarkan komposisi ketinggian di atas permukaan laut (dpl) maka Kabupaten Manggarai terbagi atas (a) 0 - 100 m dpl seluas 16.487 Ha (3,94%), (b) 100 - 500 m dpl seluas 25.310 Ha (6,04%), (c) 500 - 1.000 m dpl seluas 81.979 Ha (19,57%) dan (d) > 1.000 m dpl 29.512 Ha (70,45%).
- 3) Berdasarkan tingkat kemiringan tanah. Kondisi topografis Kabupaten Manggarai adalah berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis. Lahan dengan kemiringan 0-2<sup>0</sup> mencapai 16.487 Ha (3,94%), 2-15<sup>0</sup> mencapai 25.310 Ha (6,04%), 15-40<sup>0</sup> mencapai 81.979 Ha (19,57 %) dan > 40<sup>0</sup> mencapai 295.121 Ha (70,45%). Kondisi topografis yang demikian mengakibatkan usaha pertanian lahan kering dengan kemiringan curam umumnya produktivitasnya rendah.
- 4) Berdasarkan jenis penggunaan tanah meliputi perkampungan seluas 1.358 Ha, sawah dengan perincian 2 (dua) kali tanam seluas 2.702 Ha dan 1 (satu) kali tanam seluas 2.833 Ha, tegalan/ladang seluas 29.174 Ha, perkebunan seluas 431 Ha, kebun campur seluas 14.540 Ha, hutan (baik hutan lebat, hutan belukar dan hutan sejenisnya) seluas 48.990 Ha, semak/alang-alang padang rumput seluas 66.791 Ha dan danau/ kolam /rawa seluas 21 Ha.
- 5) Iklim  
Secara umum dikenal 2 (dua) musim yaitu musin hujan dan musin kemarau. Kedua musim ini silih berganti dengan jumlah curah hujan rata-rata 2.440,9 mm. Rata-rata bulan basah adalah tujuh (7) bulan setiap tahun.
- 6) Di dalam perut bumi Kabupaten Manggarai terkandung bahan-bahan mineral seperti logam mulia, logam dasar besi dan bahan galian industri seperti batu kapur, tanah liat, gypsum, pasir, silica, belerang, barit dan lain-lain. Dari sumber daya pertambangan tersebut hanya beberapa mineral yang telah dieksplorasi seperti mangan, pasir dan batu kali. Peranan sektor pertambangan dalam ekonomi masih potensial untuk digali dan menjadi sumber ekonomi yang patut dikembangkan. Keterlibatan investor di sektor pertambangan juga masih rendah.

- 7) Pengamanan wilayah-wilayah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Jalur Hijau belum diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, terutama bagi pembangunan perumahan penduduk dan kantor pemerintahan. Karena itu diperlukan keberanian untuk menetapkan wilayah DAS dan Jalur Hijau dalam perencanaan tata ruang wilayah dan penertiban atas bangunan yang didirikan di daerah DAS dan Jalur Hijau.

### 3. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB di Kabupaten Manggarai sesuai data Manggarai Dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai tahun 2016 mencapai Rp.3.347.462,9 (Juta Rupiah) atas harga berlaku atau sebesar Rp.2.479.710,8 (Juta Rupiah) atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.346.582,4 (atas harga berlaku) atau sebesar Rp.121.299,3 (atas harga konstan).

**Gambar 1.2**

#### **Aktivitas Pendukung Perekonomian Kabupaten Manggarai**



Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB Kabupaten Manggarai tahun 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2016, dan yang terendah adalah sektor listrik dan gas. Secara lengkap dapat dibaca pada table 1 berikut ini.

Tabel 1. Nilai PDRB Kabupaten Manggarai  
Menurut Lapangan Usaha, 2014-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		ADH Berlaku		ADH Konstan		Ket.
		2014	2015	2014	2015	
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	737,573.0	804,471.8	562,202.6	571,890.1	
b.	Pertambangan dan Penggalian	105,964.4	124,890.6	77,091.0	84,214.8	
c.	Industry pengolahan	11,487.2	12,454.8	9,998.3	10,381.6	
d.	Pengadaan listrik dan Gas/Electriciy and Gas	1,786.8	2,249.7	1,689.5	1,851.2	
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang /Water Supply	2,924.8	3,158.4	2,568.0	2,704.0	
f.	Konstruksi	418,876.5	461,840.2	311,341.5	329,277.5	
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	263,894.2	294,249	210,484.8	223,064.6	
h.	Transportasi dan Pergudangan	101,650.4	113,495.2	81,807.6	86,271.2	
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,680.2	14,707.9	9,877.7	10,536.1	
j.	Informasi dan Komunikasi	279,870.2	303,905.8	215,693.5	231,528.9	

k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	205,244.6	231,835.8	169,784.7	181,578.1	
l.	Real Estat/Real Estate Activites	81,147.3	88,589.0	62,820.4	64,154.6	
m,n.	Jasa Perusahaan	5,903.5	6,780.8	4,421.8	4,832.3	
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	384,195.6	456,312.7	319,831.1	342,808.6	
p.	Jasa Pendidikan	215,028.1	237,983.3	179,241.7	188,911.2	
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55,795.8	62,970.3	45,744.9	48,303.7	
r,s,t,u	Jasa Lainnya	116,840.1	127,567.4	93,848.4	97,402.3	
	<b>PDRB</b>	<b>3,000,880.5</b>	<b>3,347,462.9</b>	<b>2,243,300.0</b>	<b>2,358,939.0</b>	

Sumber : BPS Kab. Manggarai Thn 2016

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2015 di Kabupaten Manggarai tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2015 kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 25,03% kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi 13,80%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,63%, sektor Informasi dan Komunikasi 9,07%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,79%, sektor Jasa Pendidikan 7,11%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 6,93%, sektor Jasa Lainnya 3,81%, Sektor Pertambangan dan Penggalian 3,73%, Sektor Transportasi dan Pergudangan 3,39%, Sektor Real Estate 2,65%, Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,88%, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,44%, Sektor Industri Pengolahan 0,37% Sektor Jasa Perusahaan 0,20%, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang 0,09% dan kontribusi paling kecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai kontribusi 0,07%.

## 1.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN MANGGARAI

Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 adalah:

### A. Bidang Ekonomi

1. Penerapan Sapta usaha Tani Belum optimal.
2. Masih rendahnya Konsumsi Pangan Yang beragam, bergizi seimbang dan Aman.
3. Rendahnya Kualitas Produksi dan Produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya.
4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Ternak.
5. Masih adanya Praktek Perdagangan Monopsoni dan Oligopsoni pada perdagangan Komoditi perkebunan.
6. Belum berkembangnya Industri kreatif (Home Industry).
7. Masih Rendahnya kualitas tata kelolah koperasi.
8. Peningkatan sarana prasarana perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Konektivitas Tol Laut Wilayah Timur dan Barat Indonesia.
9. Belum mantapnya sistem transportasi antar Desa dan antar kota dalam wilayah Kabupaten Manggarai.
10. Terbatasnya Akses Komunikasi dan Informatika.
11. Masih adanya desa - desa yang belum memiliki listrik sebagai Sumber penerangan utama di Kabupaten Manggarai.
12. Rendahnya Kompetensi , Produktivitas, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja.
13. Tingginya Resiko Daya Rusak Air Terhadap Kawasan Budidaya (Permukiman, Pertanian).
14. Rendahnya cakupan layanan air minum bersih perkotaan dan perdesaan.
15. Masih adanya Permukiman Kumuh dan Lingkungan Kumuh.
16. Flores termasuk dalam 25 kawasan pariwisata nasional.

### B. Bidang Kesehatan

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat.

2. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas lewat Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alkes, Pengawasan Obat dan Makanan, dan SDM Kesehatan.
4. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
5. Pengembangan JKN dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
6. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Akses dan Kualitas Pelayanan KB belum optimal
8. Kesadaran KB yang terlambat (setelah memiliki anak > 3)
9. Jumlah Keluarga Sejahtera masih rendah

**C. Bidang Pendidikan**

1. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan nasional
2. Peningkatan mutu dan daya saing SDM dalam rangka memasuki Era Pasar Bebas

**D. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

1. Belum terwujudnya kota Ruteng sebagai kota bersih.
2. Menurunnya debit air minum.
3. Meningkatnya pencemaran Tanah, Air dan Udara yang disebabkan oleh adanya Usaha/kegiatan.
4. Belum tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Masih luasnya kawasan kritis di dalam kawasan Hutan dan luar kawasan hutan.
6. Belum optimalnya patroli Rutin/Terpadu pengamanan hutan dan Penyuluhan.
7. Pengelolaan pertambangan yang belum mendukung pelestarian lingkungan dan berbasis tata ruang.
8. Ketidakpastian informasi perubahan iklim.

9. 70,45% wilayah kabupaten Manggarai berada pada kemiringan lebih dari 40 derajat menyebabkan Manggarai kategori rawan bencana.
10. Meningkatnya kepadatan penduduk dengan aktifitasnya .

#### **E. Bidang Hukum dan Ham**

1. Masih tingginya Lahan yang belum memiliki sertifikat.
2. Percepatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil.
3. Belum Optimalnya Penanganan Penduduk yang Ilegal dan Beridentitas ganda.
4. Masih rendahnya kesetaraan Gender.
5. Meningkatnya kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dan Eksploitasi perdagangan perempuan dan anak.
6. Rumah layak huni bagi KK miskin.
7. Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
8. Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
9. Masih rendahnya kapasitas Aparatur Desa.
10. Masih rendahnya kontribusi PADes terhadap APBDes.
11. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
12. Pengelolaan Administrasi Keuangan pada SKPD, sekolah dan Pemerintah Desa.
13. Rendahnya kesadaran tindak lanjut temuan SKPD.
14. Penerapan Teknologi Informasi (SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD).
15. Rendahnya Rasio Kontribusi PAD terhadap APBD.
16. Rendahnya Kualifikasi SDM Aparatur sesuai tuntutan Undang-undang ASN.
17. Masih rendahnya tertib Administrasi Kepegawaian.
18. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
19. Belum Optimalnya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Penanaman Modal.
20. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu.
21. Tingginya Tingkat Kepadatan penduduk.

## 1.5 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah kabupaten. Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas;
- 5) Badan; dan
- 6) Kecamatan.

### 1.5.1 Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Perda tersebut, maka susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan tipe A;
  2. Dinas Kesehatan tipe A;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A;
  6. Dinas Sosial tipe A;
  7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A;

8. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja tipe A;
  9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
  12. Dinas Perhubungan tipe B;
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C;
  14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A;
  15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A;
  16. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A;
  17. Dinas Pertanian tipe A;
  18. Dinas Peternakan tipe A; dan
  19. Dinas Perdagangan tipe B.
- e. Badan Daerah terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A;
  2. Badan Keuangan tipe A;
  3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B.
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Langke Rembong tipe A;
  2. Kecamatan Ruteng tipe A;
  3. Kecamatan Wae Ri'i tipe A;
  4. Kecamatan Cibai tipe A;
  5. Kecamatan Reok tipe A;
  6. Kecamatan Satar Mese tipe A;
  7. Kecamatan Satar Mese Barat tipe A;
  8. Kecamatan Lelak tipe A;
  9. Kecamatan Rahong Utara tipe A;
  10. Kecamatan Cibai Barat tipe A;
  11. Kecamatan Reok Barat tipe A; dan
  12. Kecamatan Satar Mese Utara tipe A.

**2.5.2 Badan Kesbangpollinmas** merupakan SKPD yang tidak diatur dalam PP 18 Tahun 2016 dan Perda 9 Tahun 2016, dan karena itu tetap menjalankan

tugasnya sesuai Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

**5.2.3 BLUD RSUD dr. Ben Mboi** tetap menjalankan tugasnya sesuai Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

**5.2.4 Perda Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2009** tentang Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.

**5.2.5 Perda Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2013** tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai.

1.6 JUMLAH JABATAN STRUKTURAL LINGKUP PEMKAB MANGGARAI

JUMLAH JABATAN STRUKTURAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama Perangkat Daerah	Tipe	ESELONERING						Total Struktural
			IIA (Sekretaris Daerah)	IIB (Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kasat, Sekwan)	IIIA (Kabag Sekretaris, Inspektur Pembantu, Camat)	IIIB (Kabid, Sekcam, Sekretaris BPBD, Sekretaris DP KORPRI)	IVA (Kasubbag, Kasi, Kasubbid, Lurah, Kepala UPT Kelas A)	IVB (Kasubag SET. DP KORPRI, Kasubbag Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kasi Kelurahan, Kepala UPT Kelas B, Kasubbag TU UPT Kelas A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Sekretariat Daerah	A	1	6	8		24		39
2	Sekretariat DPRD	B		1	3		9		13
3	Inspektorat Daerah	A		1	5		3		9
4	Dinas Pendidikan	A		1	1	5	18		25
5	Dinas Kesehatan	A		1	1	4	15		21
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B		1	1	5	17		24
7	Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	A		1	1	5	18		25
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A		1	1	5	18		25

9	Dinas Sosial	<b>A</b>		1	1	4	15		<b>21</b>
10	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	<b>A</b>		1	1	5	18		<b>25</b>
11	Dinas Lingkungan Hidup	<b>B</b>		1	1	3	11		<b>16</b>
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>A</b>		1	1	4	15		<b>21</b>
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>B</b>		1	1	3	11		<b>16</b>
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>A</b>		1	1	5	18		<b>25</b>
15	Dinas Perhubungan	<b>B</b>		1	1	3	11		<b>16</b>
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>C</b>		1	1	2	8		<b>12</b>
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<b>A</b>		1	1	5	18		<b>25</b>
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<b>A</b>		1	1	5	18		<b>25</b>
19	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	<b>A</b>		1	1	5	18		<b>25</b>
20	Dinas Pertanian	<b>A</b>		1	1	4	15		<b>21</b>
21	Dinas Peternakan	<b>A</b>		1	1	4	15		<b>21</b>
22	Dinas Perdagangan	<b>B</b>		1	1	3	11		<b>16</b>
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	<b>A</b>		1	1	5	18		<b>25</b>
24	Badan Keuangan	<b>A</b>		1	1	6	21		<b>29</b>

25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<b>B</b>		1	1	3	11		<b>16</b>
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1	1	2	7		<b>11</b>
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1		4	9		<b>14</b>
28	BLUD RSUD dr.Ben Mboi				1	5	11		<b>17</b>
29	Kecamatan Langke Rembong	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
30	Kecamatan Wae Ri'i	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
31	Kecamatan Cibal	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
32	Kecamatan Cibal Barat	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
33	Kecamatan Reok	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
34	Kecamatan Reok Barat	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
35	Kecamatan Lelak	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
36	Kecamatan Rahong Utara	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
37	Kecamatan Satar Mese Barat	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
38	Kecamatan Satar Mese	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
39	Kecamatan Satar Mese Utara	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
40	Kecamatan Ruteng	<b>A</b>			1	1	5	2	<b>9</b>
41	Sekretariat DP KORPRI					1		3	<b>4</b>
42	Kelurahan						26	104	<b>130</b>
43	Unit Pelaksana Teknis						69	69	<b>138</b>
<b>Total PP No. 18 / 2016 dan Perda No. 9 / 2016</b>			<b>1</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>117</b>	<b>556</b>	<b>200</b>	<b>958</b>

## 1.7. SDM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2016, jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebanyak **5.024 orang**, dengan perimbangan Laki-laki 2.833 orang dan Perempuan 2.191 orang.

- a. Keadaan Pegawai menurut Pendidikan dapat dibaca pada tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	54	1,07
2.	SMP	79	1,57
3.	SMA	1.908	37,98
4.	D-1	40	0,80
5.	D-2	443	8,82
6.	D-3	726	14,45
7	D-4	47	0,94
7.	S-1	1.674	33,32
8.	S-2	52	1,04
9.	S-3	1	0,02
<b>JUMLAH</b>		<b>5.024</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BKPP Kabupaten Manggarai

- b. Keadaan PNS menurut Golongan dapat dibaca pada tabel berikut:

GOLONGAN		RUANG					
		D	C	B	A	JUMLAH	%
1	IV	1	22	65	974	<b>1.062</b>	<b>21,14</b>
2	III	657	650	471	904	<b>2,686</b>	<b>53,47</b>
3	II	303	372	230	285	<b>1.190</b>	<b>23,69</b>
4	I	17	37	8	24	<b>86</b>	<b>1,71</b>
<b>JUMLAH</b>						<b>5.024</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BKPP Kabupaten Manggarai

## 1.8 INOVASI PENGELOLAAN SDM APARATUR



Inovasi pengelolaan SDM merupakan bagian kunci dalam manajemen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sistem rekrutmen pegawai telah menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dan sudah mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah Kabupaten

Manggarai juga tidak menerima CPNS berijazah SMA/ sederajat, rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan melakukan *fit and proper test*, lelang jabatan terbuka dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Manggarai. Upaya-upaya ini dipandang strategis untuk menjawab tuntutan akan adanya birokrasi yang berkualitas dan bersih melayani dan berakuntabilitas di Kabupaten Manggarai.

Selain perbaikan pada aspek rekrutmen, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga akan menerapkan presensi pegawai dengan menggunakan sidik jari, dan pengembangan penerapan Pakta Integritas Unit Kerja sampai kepada tingkatan Eselon IV.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2016-2021 akan berkantor di Desa pada hari Jumat dan Sabtu setiap bulannya, melakukan pengendalian terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Rapat Triwulanan bersama Pimpinan Perangkat Daerah.

Selain inovasi dalam bidang pengelolaan SDM berupa sistem rekrutmen CPNSD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), pemerintah Kabupaten Manggarai juga melaksanakan pelelangan pengadaan proyek melalui website [lpse.manggaraikab.go.id](http://lpse.manggaraikab.go.id) sejak tahun 2014. sehingga membuka peluang bagi siapa saja yang mau mengikuti pelelang tersebut. Hal ini mau menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan proyek di Kabupaten Manggarai dilakukan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.